

JURNAL
IMPLEMENTASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)

ARTIKEL ILMIAH
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
ARIEF RIZKI RAMADHAN
NIM. 0810110089



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN GOOD GOVERNANCE
(Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh :

ARIEF RIZKI RAMADHAN

NIM 0810110089

Disetujui tanggal : Maret 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

ABSTRACT

Arief Rizki Ramadhan, State administrative law, Faculty Of Law, Brawijaya University March 2014. Implementation Of Government Accountability Report In Term Creating Finance Management Policy Building On Good Governance (Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi), Agus Yulianto, SH.MH, Lutfi Effendi, SH. Mhum.

This research discusses Implementation conducted by the Department of revenue of Banyuwangi Regency along with obstacles faced as well as the efforts to overcome the obstacles.

By using the Juridical Sociological approach methods and methods of analysis of qualitative diskriptif derived conclusion that Regional Income Agency has implemented performance accountability reports to government agencies in accordance with the Regional financial management policies based on the principles of Good Governance, especially transparency and accountability.

Obstacles faced by Service Revenue Banyuwangi in 2013 related to revenue enhancement efforts, namely, Internal problems, namely: Volume and load the task is large enough, the limited qualified professionals (accountants, Tax Assessors, Juru Sita, Asset Appraisers and PPNS). External issues, namely: The extent of the coverage of the tax levy and the object to be reached, so that makes it difficult for the officer in carrying out logging and billing, Still low awareness taxpayers and levy in the discharge of the obligation to pay taxes and levies, There must arrangements prior permission on other agencies (Billboard installation permits), so there is the impression the procedure is too long and potentially the loss of taxpayer

efforts that have been undertaken by the Department of revenue of Banyuwangi Regency is routinely do synchronization in tax and regional levies by carrying out periodic monitoring of advertising-Billboard in Banyuwangi Regency, Carrying out socialization and an appeal to the tax payers to be more active in paying taxes and regional levies, doing an intensive coordination and consolidation with SKPD income in order to increase revenue, Provide guidance and socialization to stake holders about the importance of taxes for development in Banyuwangi Regency, Trying to provide the best service for the people who perform the obligation to pay taxes advice given is the Revenue Department Should keep doing Banyuwangi socialization programs work to the community so that people are motivated to participate in the development of its territory, Department of revenue of Banyuwangi Regency should change its human resources in accordance with the required quality to his runs programs in accordance with planned.

Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak memasuki era reformasi tahun 1998 mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik bergeser ke sistem desentralistik, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan yang implementasinya diiringi tanggung jawab dan sumber daya yang diperlukan. Otonomi daerah merupakan pengejawatahan dari makna desentralisasi secara utuh.

Penerapan otonomi daerah diperlukan adanya political will (kemauan politik) dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kemauan politik ini sangat penting, karena diyakini dapat mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam suatu wadah pemahaman yang berorientasi pada suatu tujuan, yakni membangun pemberdayaan daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera¹. Dengan kemauan politik ini diharapkan mampu menumbuhkan prakarsa daerah dan pemikiran-pemikiran menjadi suatu kekuatan yang penting bagi proses pembangunan.

Pemerintah daerah selama ini masih memprioritaskan mencari sumber penghasilan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun kurang mengoptimalkan sumber yang sudah ada. Tindakan tersebut didapat dengan cara mengoptimalkan pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Lemahnya pengelolaan keuangan dan aset daerah tak hanya terbengkalainya aset-aset milik pemerintah daerah lebih dari itu cenderung membebankan anggaran yang

¹ <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/isu-dan-masalah-perencanaan-pembangunan-daerah-presentation> Diakses 2 januari 2014.

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah memunculkan optimisme baru dalam penataan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat/stake-holder.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan inisiatif dan kreativitasnya dengan melakukan usaha-usaha yang konkrit dan konstitusional dalam mencari dan menggali terutama pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu suatu sistem laporan untuk pertanggungjawaban kepada Pejabat

dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Good Governance di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Serta apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dan bagaimana solusinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlaku hukum positif di masyarakat. Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini supaya mendapatkan data yang akurat yaitu di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena merupakan salah satu yang berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain secara tidak langsung oleh penulis dari subyek penelitian.

Sumber data primer adalah data atau informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Pengelolaan keuangan daerah di dinas pendapatan daerah Kabupaten banyuwangi. Penelitian informasi dalam penelitian ini dengan purposive sampling dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui secara mendetail. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Pembahasan.

Implementasi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan *Good Governance*.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintahan. Dimana dalam laporan tersebut terdapat pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi suatu instansi pemerintahan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang

sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Instansi pemerintahan dalam hal penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan membagi laporan menjadi tiga(3) aspek utama yang disajikan, terutama terkait dengan tingkat capaian kinerja serta akuntabilitas kinerja dan keuangan yaitu²:

1. Pengukuran Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Tahun 2013 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut³:

² Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2013

³ *Ibid* Hal 20.

Tabel 4.1 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi	%	Keterangan
Meningkatnya pendapatan Daerah yang mencerminkan dengan meningkatnya PAD	Peningkatan Optimalisasi penerimaan daerah			
	jumlah penerimaan pajak daerah	65.940.245.833	110,42	-
	jumlah penerimaan retribusi daerah	3.863.045.300	84,62	-
	jumlah penerimaan lain-lain PAD yang sah	1.513.000	11,96	-
	meningkatkan potensi sumberdaya lokal terhadap kualitas pelayanan pasar			
	kualitas pelayanan publik			Mendapat sertifikat baik sbg percontohan

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2013, tidak diolah

Anggaran untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun Anggaran 2013, yaitu⁴:

Tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi PAD Tahun 2013

Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/(kurang) (Rp.)	Capaian (%)
Pajak Daerah	59.715.970.322,00	65.940.245.833,00	6.224.276.511,00	110,42
Retribusi Daerah	4.565.139.945,00	3.863.054.300,00	-702.085.648	84,62
Retribusi Jasa Umum	3.369.629.245,00	3.279.959.300,00	-89.669.945,00	97,34
Retribusi Jasa Usaha	1.195.510.700,00	583.095.000,00	-612.415.700,00	48,77
Lain-lain yang Sah PAD	12.653.700,00	1.513.000,00	-11.140.700,00	11,96
Jumlah	64.293.763.967,00	69.804.813.133,00	5.511.049.166,00	108,57

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2013, tidak diolah

Pendapatan Asli Daerah banyuwangi pada tahun 2013 jika dilihat dari tabel adalah disumbang oleh tingkat realisasi pendapatan pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup tinggi dengan tingkat capaian sebesar 110,42 % dari target yang sudah ditetapkan.

⁴ *Ibid* hal 21

Tabel target dan realisasi belanja) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013

Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/(kurang) (Rp.)	Capaian (%)
Belanja tidak langsung	12.899.744.430,00	9.112.516.006,00	3.787.228.424,00	70,64
Belanja langsung	9.586.534.000,00	9.065.554.113,00	520.979.867,00	94,57
Belanja Pegawai	2.474.810.000,00	9.065.554.133,00	236.602.000,00	90,44
Belanja Barang dan Jasa	3.961.396.407,00	2.238.208.000,00	266.837.784,00	93,26
Belanja Modal	3.150.327.593,00	3.132.787.510,00	17.540.083,00	99,44
JUMLAH	22.486.278.430,00	18.178.070.139,00	(4.308.208.291,00)	80,84

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2013, tidak diolah

Jika dilihat dari angka secara keseluruhan total dana yang direalisasikan oleh dinas pendapatan kabupaten banyuwangi dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa dana yang digunakan tahun 2013 terdapat penurunan anggaran, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran yang digunakan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2013 disebut efektif dan efisien.

2. Analisis Capaian Kinerja

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), untuk sasaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan sasaran yang harus dicapai yaitu ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2013 jumlah PAD yang menjadi tanggungjawab dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berhasil melampaui target sebesar 108,57%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh salah satu indikator sasaran yang memberikan kontribusi besar yaitu pendapatan pajak daerah.

Sedangkan Anggaran belanja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 hanya terealisasi sebesar 80,84%, hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan atau tidak direalisasikan secara penuh, namun keluaran mencapai 100% yaitu:

- a. Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan hanya dapat direalisasikan sebesar 70,18%. Hal ini disebabkan karena proses yang terlalu rumit dan tidak ada kelancaran untuk menjalankan.
- b. Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor hanya dapat direalisasikan sebesar 93,42%. Hal ini disebabkan karena masih ada stok pada triwulan sebelumnya.
- c. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD hanya dapat direalisasikan sebesar 96,70%. Hal ini disebabkan waktu yang tidak mencukupi dalam pertanggungjawaban padahal kegiatan ini banyak melakukan kegiatan di luar jam kerja.

- d. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Sub Bidang Potensi Asset Daerah hanya dapat terealisasi sebesar 77,90%. Hal ini disebabkan karena tidak ada keterkaitan dengan narasumber yang ditunjuk.
- e. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Sub Bidang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah hanya dapat terealisasi sebesar 93,29%. Hal ini disebabkan karena adanya masalah administrasi.
- f. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Sub Bidang Pengelola Pasar hanya dapat terealisasi 77,69%. Hal ini disebabkan karena administrasi yang telah disediakan tetapi tenaga harian lepas baru masuk pada Bulan April 2013 jadi baru direalisasikan pada bulan tersebut.
- g. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Sub Bidang PBB dan BPHTB hanya dapat terealisasi sebesar 98,28%. Hal ini disebabkan karena peta yang di Kantor KPP tidak bisa dibuka dan harus sesuai dengan standar harga yang ada.
- h. Selain kegiatan tersebut diatas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 hampir seluruhnya mengalami efisiensi dikarenakan untuk belanja barang dan jasa harga penawaran dari penyedia barang yang relatif kecil dari anggaran yang tersedia⁵.

Berdasarkan analisis capaian kinerja diatas maka Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi didalam melaksanakan tugas sebagai instansi teknis bidang pendapatan, khususnya pendapatan pajak dan retribusi daerah, terkait dengan sasaran strategis berupa meningkatnya pendapatan daerah yang dicerminkan dengan meningkatnya PAD telah berhasil melampaui target sebesar

⁵ *Ibid* Hal 24

108,7% dari target yang telah ditetapkan.,sedangkan dari anggaran belanja dapat terealisasikan sebesar 80.4 % dari target yang telah diterapkan.

3. Akuntabilitas Keuangan

a. Pendapatan

Pada Tahun 2013 ditinjau dari penerimaan pendapatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berhasil melampaui target mencapai 108,57%, yakni dari target sebesar Rp. 64.293.763.967,00, realisasi penerimaan mencapai Rp. 69.804.813.133,00. peningkatan tersebut disebabkan oleh 4 indikator sasaran yang memberikan kontribusi yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pada Tahun 2013 Pendapatan Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mencapai target sasaran, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 59.715.970.322,00 tercapai realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 65.940.248.833,00 dengan kata lain berhasil melampaui target mencapai 110,42%⁶

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang tercatat di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 mencakup Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan yang ada di lingkungan pasar daerah mampu mencapai 100,64% dari target yang ditetapkan. Yaitu dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 33.261.600,00 realisasi penerimaan tercapai Rp. 33.472.900,00 atau

⁶*Ibid* Hal 25.

lebih Rp. 211.300,00 dari target selanjutnya terdapat Retribusi Pelayanan Pasar yang mampu mencapai 97,31% dari target yang ditetapkan, yaitu dari target sebesar Rp. 3.336.367.654,00 realisasi penerimaan mencapai Rp. 3.246.486.400,00 atau kurang Rp. 89.861.245,00. dan jenis retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Adapun dari jenis retribusi tersebut di atas, yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah retribusi sewa tanah dan bangunan yang mencapai 163,48% dari target yang ditetapkan, dimana dari target Rp. 233.750.000,00 realisasi penerimaan mencapai Rp. 382.129.000,00 atau lebih Rp. 148.379.000,00. Selanjutnya retribusi sewa gedung/asrama, dari target yang ditetapkan hanya mampu mencapai 16,41%, dimana dari target yang ditetapkan Rp. 909.859.000,00 realisasi penerimaan hanya mencapai Rp. 149.261.000,00 atau kurang Rp. 760.578.000,00. Masih dalam retribusi jasa usaha, selanjutnya adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dimana yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah Stadion Diponegoro yang mencapai 126,50% dari target yang ditetapkan, yaitu dari target Rp. 30.000.000,00 realisasi penerimaan Rp. 37.950.000,00 atau lebih Rp. 7.950.000,00. Selain retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, selanjutnya terdapat lain-lain PAD yang sah, dimana dari hasil dari penggantian biaya cetak karcis hanya mampu mencapai 11,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.653.700,00 realisasi penerimaan mencapai Rp. 1.486.000,00.⁷

⁷ *Ibid* Hal 25.

b. Belanja

Sedangkan untuk belanja dari anggaran yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp. 22.486.278.430,00 ternyata dana yang digunakan hanya sebesar Rp. 18.178.070.139,00 atau menggunakan anggaran 80,84%. Untuk belanja tidak langsung, dari anggaran dana yang ada direalisasikan sebesar 70,64%, sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran dana yang ada, direalisasikan sebesar 94,57%.

A. Permasalahan/Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dan Solusinya.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi dari laporan akuntabilitas instansi pemerintahan terutama berkaitan dengan penyusunan laporan secara umum relatif kecil atau tidak ada, namun kendala yang ada dan dihadapi, dimana sedikit banyak kendala tersebut mempengaruhi kinerja instansi terutama dalam rangka upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:

1. Masalah Internal, yaitu:
 - a. Volume dan beban tugas yang cukup besar;
 - b. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Akuntan, Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS).
2. Masalah eksternal, yaitu:
 - a. Luasnya cakupan objek pajak dan retribusi daerah yang harus dijangkau, sehingga menyulitkan petugas dalam melaksanakan pendataan dan penagihan;
 - b. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;

- c. Adanya keharusan pengurusan izin terlebih dahulu pada instansi lain (izin pemasangan reklame), sehingga ada kesan prosedur terlalu panjang sehingga berpotensi akan hilangnya wajib pajak.⁸

Adapun solusi dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi hambatan adalah sebagai berikut:

1. Secara rutin melakukan sinkronisasi pajak dan retribusi daerah dengan melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap reklame-reklame yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi;
2. Melaksanakan sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak untuk lebih aktif dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan SKPD penghasilan dalam rangka peningkatan pendapatan;
4. Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada *stake holders* tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.
5. Berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.⁹

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu laporan yang terutama digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

⁸ Wawancara dengan kepala Dinas Pendapatan Kabupaten banyuwangi, 29 Januari 2014

⁹ *Ibid.*

tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud telah diimplementasikan sesuai dengan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mencakup:

- a. Pengukuran Kinerja
- b. Analisis Capaian Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan

3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013 terkait dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan, antara lain:

a. Masalah Internal, yaitu:

- 1) Volume dan beban tugas yang cukup besar;
- 2) Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Akuntan, Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS).

b. Masalah eksternal, yaitu:

- 1) Luasnya cakupan objek pajak dan retribusi daerah yang harus dijangkau, sehingga menyulitkan petugas dalam melaksanakan pendataan dan penagihan;
- 2) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Adanya keharusan pengurusan izin terlebih dahulu pada instansi lain (izin pemasangan reklame), sehingga ada kesan prosedur terlalu panjang dan berpotensi hilangnya wajib pajak.

4. Solusi dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
- 1) Secara rutin melakukan sinkronisasi pajak dan retribusi daerah dengan melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap reklame-reklame yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi;
 - 2) Melaksanakan sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak untuk lebih aktif dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan SKPD penghasilan dalam rangka peningkatan pendapatan;
 - 4) Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada stake holders tentang pentingnya Pajak bagi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.
 - 5) Berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.

SARAN

1. Hendaknya Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terus melakukan sosialisasi program kerjanya kepada masyarakat agar masyarakat termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan daerahnya;
2. Hendaknya Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mengubah Sumber Daya Manusianya sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan agar program kerjanya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Farich. Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan,-Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Presentasi: Masalah Perencanaan Pembangunan. Akses pada 31 Desember 2013.

Dadang Solihin. Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/isu-dan-masalah-perencanaan-pembangunan-daerah-presentation> diakses pada 2 Januari 2014

Darise, Nurlan. 2007 Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Jakarta: PT Indeks.

Halim, Abdul (editor), 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

Hanifah Harsono, 2009 Implementasi Kebijakan dan Politik, Jakarta: Rhineka Karsa.

Juanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Alumni.

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, 2000. akuntabilitas dan GOOD Governance, modul Sosialisasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pratikno, 2004 Dari Good Governance Menuju Just & Democratic Governance”. Makalah untuk Seminar Nasional, FISIPOL UGM.

Sadu Wasistiono dkk. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: focus Media

Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Cipta Dunia.

Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II, Surabaya: UNS Press.

Syaukani, dkk. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.